LAPORAN KINERJA TRIWULAN III STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASILPERIKANAN BATAM TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (LKj Stasiun KIPM Batam) Triwulan IIII tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Batam dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Batam Tahun 2025. Pada Triwulan III tahun 2025 sudah mencapai target dan sudah terealisasi 100%.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Batam, 15 Oktober 2025
Kepala Stasiun KIPM Batam

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

M.Darwin Syah Putra, S.Pi.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

IKHTISAR EKSEKUTIF v

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 9
1.2. Gambaran Umum Kelembagaan 11
1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 13

BAB II. RENCANA AKSI SKIPM BATAM .....

2.1. Rencana Strategis 14

BAB III. EVALUASI KINERJA

3.1. Capaian Kinerja 18
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 20
3.3. Realisasi Anggaran 46

BAB IV. PENUTUP 48

LAMPIRAN..... 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1Sasaran Strategis dan Indikator dan Target Kinerja SKIPM Batam Tahun 2025..... 16

Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator ,Target , dan Realisasi Kinerja SKIPM Batam Tahun 2025 18

Tabel 3 Capaian Kinerja SKIPM Batam Tahun 2025..... 22

Tabel 4. Target dan Realisasi IK 1 pada tahun 2025 23

Tabel 5 Target dan Realisasi IK 2 pada tahun 2025..... 24

Tabel 6. Target dan Realisasi IK 3 pada tahun 2025 25

Tabel 7. Target dan Realisasi IK 4 pada tahun 2025..... 26

Tabel 8 Target dan Realisasi IK 5 pada tahun 2025 26

Tabel 9. Target dan Realisasi IK 6 pada tahun 2025..... 27

Tabel 10. Target dan Realisasi IK 7 pada tahun 2025..... 28

Tabel 11 Target dan Realisasi IK 8 pada tahun 2025 29

Tabel 12. Target dan Realisasi IK 9 pada tahun 2025..... 30

Tabel 13. Target dan Realisasi IK 10 pada tahun 2025 31

Tabel 14 Target dan Realisasi IK 11 pada tahun 2025 32

Tabel 15 Target dan Realisasi IK 12 pada tahun 2025..... 33

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 13 pada tahun 2025..... 34

Tabel 17. Target dan Realisasi IK 14 pada tahun 2025..... 36

Tabel 18 Target dan Realisasi IK 15 pada tahun 2025..... 36

Tabel 19. Target dan Realisasi IK 16 pada tahun 2025..... 37

Tabel 20. Target dan Realisasi IK 17 pada tahun 2025..... 38

Tabel 21. Target dan Realisasi IK 18 pada tahun 2025..... 39

Tabel 22. Target dan Realisasi IK 19 pada tahun 2025 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi..... 10
Gambar 2. Peta Strategi BPPPMHKP Tahun 2024 – 2029 15
Gambar 3. Dashboard Capaian IKU SKIPM Batam Tahun 2025 18

IKHTISAR EKSEKUTIF

. Terdapat 14 indikator kinerja di Triwulan III Tahun 2025, dan telah tercapai pemenuhan target sampai dengan Triwulan III,.Uraian dan status capaian dari 14 indikator tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	71,5
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Indeks)	87
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	85

		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	70
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	88

Unit Kerja STASIUN KIPM BATAM

Bulan September-2025

Skor Kinerja 114,77

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	POLARISASI	TW-3	
						TARGET	CAPAIAN
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	0,00	100,00
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	70,00	100,00
3	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.3	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	99,00	100,00
4	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	angka	Maximize	0,00	0,00
5	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	angka	Maximize	0,00	0,00

6	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.1	Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	00,00	00,00
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	0,00	0,00
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	00,00	0,00
10	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
11	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	85,00	100,00

12	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.7	PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP SKIPM Batam	%	Maximize	76,00	100,00
13	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.8	Nilai Pembangunan Integritas SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
14	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup SKIPM Batam	Indeks	Maximize	88,00	99,04

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Kinerja keuangan Stasiun KIPM Batam Tahun 2025 melalui program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran Triwulan III sebesar Rp.8.226.812.000,- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Batam 2025 sampai dengan Triwulan III mencapai Rp. 3.990.761.959,- atau sebesar 58,63%

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Batam mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistim manajemen mutu, serta sebagai otoritas kompeten dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. BPPMHKP Batam juga melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir, Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawain, keuangan dan rumah tangga.

Sampai dengan tahun 2025 struktur organisasi Stasiun KIPM Batam dapat dilihat pada gambarberikut ini:

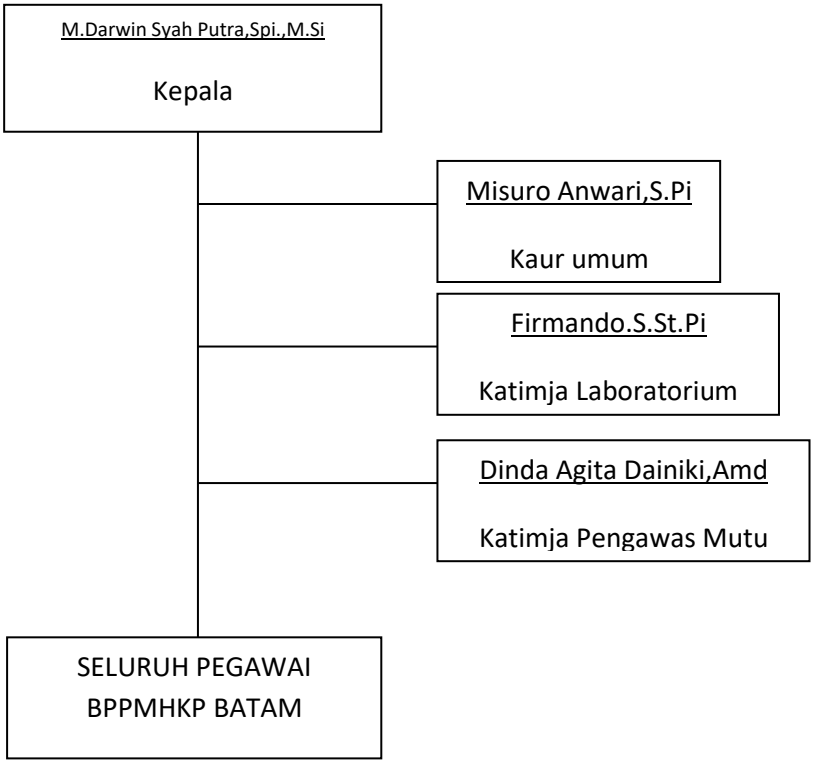

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KIPM BATAM

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Batam dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja (LKj). LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Batam dalam rangka melaksanakan misi Stasiun KIPM Batam dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingandemi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Batam. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Stasiun KIPM Batam

BKIPM dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil

perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatanprioritas, yaitu:

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanaan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
3. Tata kelola pemerintahan yang efektif , lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan

pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang di dukung

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan *(official control)*. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan perkarantinaan, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dilihat dari prioritas pembangunan kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

a. Pengawasan terintegrasi di wilayah perbatasan;
b. Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan;
c. Daya Saing dan Nilai Tambah Hasil Perikanan

1.4 Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan penyajian LKJ Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanankepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapiorganisasi.
b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yangbersangkutan.
c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen PerjanjianKinerja.
d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Dalam rangka menyatukan arah dan mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan optimal, Stasiun KIPM Batam mempunyai visi yang ingin dicapai yaitu **“ Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi Dan Terpercaya”.**

2.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Stasiun KIPM Batam adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pintu masuk negara dan wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian, dan monitoring;
3. Meningkatan penerapan praktik baik di seluruh rantai pasok dan kepatuhan terhadap standar mutu hasil kelautan dan perikanan ;

2.3 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Stasiun KIPM Batam, adalah sebagai berikut;

1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar;
3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (LKj Stasiun KIPM Batam) Triwulan III tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Batam dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaantugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Batam Tahun 2025. Pada Triwulan III tahun 2025 semua target terealisasi 100%. Stasiun KIPM Batam telah menetapkan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Batam tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini

Gambar 1.2 Peta Strategis SKIPM Batam Tahun 2025

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Batam Tahun 2025

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	POLARI SASI	TARGET 2025
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	70,00
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	70,00
3	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.3	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	99,00
4	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	angka	Maximize	0,00
5	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	angka	Maximize	0,00
6	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.1	Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	0,00
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00
10	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00

11	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	85,00
12	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.7	PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP SKIPM Batam	%	Maximize	76,00
13	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.8	Nilai Pembangunan Integritas SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00
14	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup SKIPM Batam	Indeks	Maximize	88,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Nilai pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat diakses melalui aplikasi pengelolaan kinerja yaitu *www.kinerjaku.kkp.go.id*

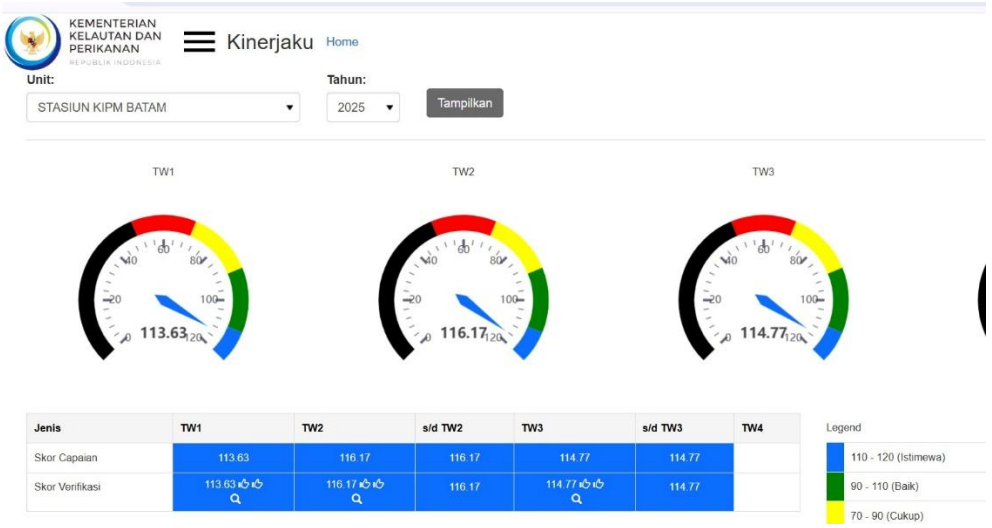

Berikut ini disampaikan ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Batam tahun 2025 Triwulan I,sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan III Tahun 2025

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	POLARISASI	TW-3	
						TARGET	CAPAIAN
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	0,00	0,00
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	70,00	100,00
3	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.3	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	99,00	100,00

4	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	angka	Maximize	0,00	0,00
5	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	angka	Maximize	0,00	0,00
6	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.1	Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	85,00	0,00
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	0,00	0,00
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	75,00	0,00
10	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
11	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	85,00	100,00
12	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.7	PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP SKIPM Batam	%	Maximize	76,00	100,00
13	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.8	Nilai Pembangunan Integritas SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
14	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup SKIPM Batam	Indeks	Maximize	88,00	99,04

3.2 Analisis dan Evaluasi

1.1 Kegiatan 1. Manajemen Mutu

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
1.2.IKU1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran penting yang menunjukkan sejauh mana produk perikanan memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang ditetapkan, sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan menjaga dan meningkatkan persentase ini, sektor kelautan dan perikanan dapat berkontribusi lebih optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi sektor produksi primer dilakukan berdasarkan permohonan yang masuk pada sistem OSS maupun secara manual. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Unit Pembenihan Rakyat dan Unit Pembesaran Rakyat belum faham mengenai aplikasi OSS sehingga berdampak dalam melakukan permohon sertifikasi dan sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimtek Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan.

Untuk itu diperlukan sosialisasi mengenai sistem aplikasi OSS kepada pengguna jasa dan diadakannya Biimtek CPIB untuk awak kapal perikanan .

Tabel 3 Capaian Target dan Realisasi IKU 1 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III 2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2025-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan(%)	0	0	0	0	0	0	0%		0

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 1 diberikan anggaran sebesar Rp.70.0000 dengan realisasi sebesar Rp.0, kegiatan untuk

merealisasikan IKU 1 diblokir dalam rangka efisiensi anggaran sehingga kegiatan ini terealisasi menunggu pembukaan blokir .

Data dukung IKU 1

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
CERTIFICATE OF GOOD AQUACULTURE PRACTICES

NOMOR : ID-CBIB-21-L-250076

Diberikan kepada :
This is to certify that

Unit Usaha Budidaya Ikan : Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
The Aquaculture Enterprise

Nomor Induk Berusaha : -
Business Identification Number

Alamat : Jl. Raya Trans Barelang Jembatan III, P. Setoko, Batam, Kepulauan Riau
Address

Jenis Produk : Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer), Ikan Bawal Bintang (Trachinotus blochii)
Commodity

telah memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan Yang Baik dengan nilai
Has fulfilled the Good Aquaculture Practices requirements with grade

SANGAT BAIK
EXCELLENT

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in
Pada Tanggal : 24 Juni 2025
Date

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA

A. Suhartini

Sertifikat ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal dikeluarkan
The Certificate is valid for 4 year after issued date

IKU2. **Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : sertifikasi PMMT/HACCP, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten, pelaksanaan inspeksi ketertelusuran (traceability), inspeksi / verifikasi tahunan CPIB di supplier dan kegiatan surveilen konsistensi penerapan HACCP di UPI .

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan diterapkan melalui pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Internasional (Codex Alimentarius), dan standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, SKP dan penerapan CPIB di supplier diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses,dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Sedangkan untuk Surat Keterangan Penerapan Sistem Ketertelusuran dan Surat Keterangan Hasil Surveilen diterbitkan berdasarkan Unit Pengolahan Ikan yang melakukan proses produksi.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Perkembangan penyakit ikan yang dinamis dan berkembang pesatnya lalulintas komoditi perikanan di pasar internasional menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan dari luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini perlu disikapi dengan langkah kongkrit BKIPM dalam menjalankan fungsi pencegahan penyakit ikan. Untuk itu sebagai saran dalam menjawab tantangan ini diantaranya diperlukan program peningkatan wawasan sumber daya manusia sebagai operator untuk terus update dan sarana prasarana pengujian laboratorium dalam menunjang identifikasi pengenalan penyakit baru sehingga bisa mencegah masuknya ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyakit ikan merupakan salah satu faktor pembatas optimalisasi produksi perikan di Indonesia. Potensi sumber daya ikan di Indonesia sangat besar dan dapat dioptimalkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan bangsa oleh sebab itu faktor pembatas produksi dalam hal ini penyakit ikan harus dapat dicegah dan dikendalikan agar tidak masuk dari luar negeri dan menyebar yang kemudaian akan berdampak dan

menimbulkan kerugian sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan peningkatan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pengujian laboratorium yang mutakhir besar harapan tugas dan fungsi dalam pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina dapat senantiasa terlaksana dengan baik.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 2 diberikan anggaran sebesar Rp.170.000.000 tetapi sebagian anggaran diblokir dalam rangka efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan nya untuk Triwulan III realisasi sebesar Rp.5.660.000, kegiatan untuk merealisasikan IKU 2 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya .

Keberhasilan capaian sasaran strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif mempunyai IKU angka persentase target tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Target dan Realisasi IKU 2 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator KinerjaUtama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III 2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2024-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam(%)	0	0	70	100	0	0	0	0	0

Data Dukung IKU 2

C. KESIMPULAN

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh nilai Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam Triwulan III Tahun 2025 sebesar

%X = (A+B)/xn X100%

$$\%X = \frac{100+100}{200} X\ 100\%$$

= 100%

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Batam, 30 September 2025

Mengetahui, Batam
Kepala SKIPM

M. Darwin Sy

Timja Pasca Panen

Dinda Agita Dianiki

IKU3. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)

Sebagian besar ekspor ikan dan hasil perikanan Indonesia memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa lebih dari 99% produk perikanan Indonesia yang diekspor diterima di negara tujuan, dengan tingkat penolakan kurang dari 1%. Ini menunjukkan bahwa produk perikanan Indonesia secara umum memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh berbagai negara tujuan ekspor. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitaspenerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Tabel 5 Capaian Target dan Realisasi IKU 3 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III 2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2024-2029	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	0	0	99	100	0	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2023	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2024	1	100

Data Dukung IKU 3

168	AE43.0VIII202501106	PT. CAHAYA RIZKY AWALIYYA	Singapore	43.0-S-00894-2025
169	AE43.0VIII202501107	PT SURYA ARTHA MAJESTIK	Singapore	43.0-S-00890-2025
170	AE43.0VIII202501108	PT BERKAT SAMUDERA SUKSES	Singapore	43.0-S-00891-2025
171	AE43.0VIII202501109	PT. LAUTAN SEJAHTERA MANDIRI	Singapore	43.0-S-00896-2025
172	AE43.0VIII202501095	CV. KARTIKA JAYA	Singapore	43.0-S-00886-2025
173	AE43.0VIII202501096	CV. SUMBER JUWITA MANDIRI	Singapore	43.0-S-00884-2025
174	AE43.0VIII202501097	PT.TERUSAN JAYA BERSAMA	Singapore	43.0-S-00888-2025
175	AE43.0VIII202501098	PT. CAHAYA RIZKY AWALIYYA	Singapore	43.0-S-00887-2025
176	AE43.0VIII202501099	PT SURYA ARTHA MAJESTIK	Singapore	43.0-S-00882-2025
177	AE43.0VIII202501100	PT. LAUTAN SEJAHTERA MANDIRI	Singapore	43.0-S-00883-2025
178	AE43.0VIII202501101	PT BERKAT SAMUDERA SUKSES	Singapore	43.0-S-00885-2025
179	AE43.0VIII202501087	CV. KARTIKA JAYA	Singapore	43.0-S-00877-2025
180	AE43.0VIII202501089	PT.TERUSAN JAYA BERSAMA	Singapore	43.0-S-00881-2025
181	AE43.0VIII202501090	PT. CAHAYA RIZKY AWALIYYA	Singapore	43.0-S-00880-2025
182	AE43.0VIII202501091	PT SURYA ARTHA MAJESTIK	Singapore	43.0-S-00876-2025
183	AE43.0VIII202501092	PT. LAUTAN SEJAHTERA MANDIRI	Singapore	43.0-S-00875-2025
184	AE43.0VIII202501093	PT BERKAT SAMUDERA SUKSES	Singapore	43.0-S-00878-2025
185	AE43.0VIII202501094	CV. SUMBER JUWITA MANDIRI	Singapore	43.0-S-00879-2025

Batam, 31 Agustus 2025

Mengetahui,
Kepala SKIPM

Timja Pasca Panen

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si

Dinda Agita Dianiki, A.Md

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Dikarenakan penerbitan SMKHP dan penggunaan aplikasi SIAP MUTU baru saja dilaksanakan di tahun 2025 sehingga masih butuh diadakan nya sosialisasi ke pengguna jasa

Perlunya dilaksanakan nya sosialisasi mengenai aplikasi SIAP MUTU dan Sosiasisasi PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 3 diberikan anggaran sebesar Rp.5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.0, kegiatan untuk merealisasikan IKU 3 belum dilaksanakan dikarenakan kebijakan efsiensi anggaran sesuai Inpres No.01 Tahun 2025 diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan di triwulan berikutnya .

IKU4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan sandar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan survailen penerapan Hazard Analysis Critical Control Points(HACCP). Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importer akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan . Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemprosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bemasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah tidak konsistennya pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 4 diberikan anggaran sebesar Rp.95.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 23.750.000, dikarenakan tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran dibeberapa kegiatan untuk merealisasikan IKU 4 sudah

cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai laboratorium diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Tabel 5 Capaian Target dan Realisasi IKU 4 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III 2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2024-2029	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Tidak ada IKU ini di tahun 2023	0	0	0	0	Tidak ada IKU ini di tahun 2023	Tidak ada IKU ini di tahun 2024	1	100

Data Dukung IKU 4

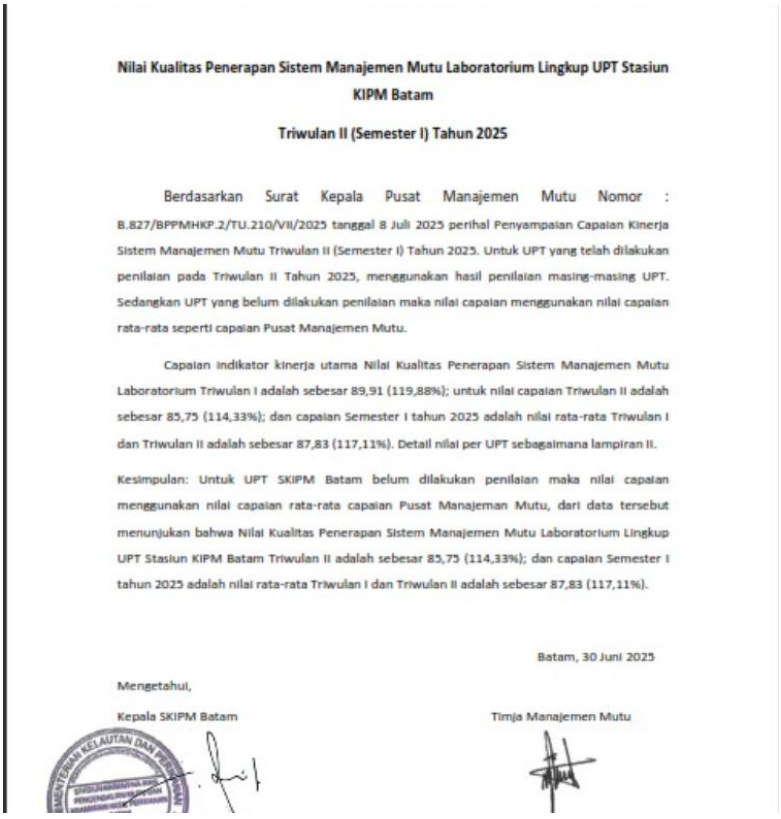

Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam

Triwulan II (Semester I) Tahun 2025

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Manajemen Mutu Nomor : B.827/BPPMHKP.2/TU.210/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu Triwulan II (Semester I) Tahun 2025. Untuk UPT yang telah dilakukan penilaian pada Triwulan II Tahun 2025, menggunakan hasil penilaian masing-masing UPT. Sedangkan UPT yang belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu.

Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Triwulan I adalah sebesar 89,91 (119,88%); untuk nilai capaian Triwulan II adalah sebesar 85,75 (114,33%); dan capaian Semester I tahun 2025 adalah nilai rata-rata Triwulan I dan Triwulan II adalah sebesar 87,83 (117,11%). Detail nilai per UPT sebagaimana lampiran II.

Kesimpulan: Untuk UPT SKIPM Batam belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata capaian Pusat Manajeman Mutu, dari data tersebut menunjukan bahwa Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam Triwulan II adalah sebesar 85,75 (114,33%); dan capaian Semester I tahun 2025 adalah nilai rata-rata Triwulan I dan Triwulan II adalah sebesar 87,83 (117,11%).

Batam, 30 Juni 2025

Mengetahui,

Kepala SKIPM Batam

Timja Manajemen Mutu

IKU5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaianterhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunda adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji

yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium. Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importer akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan.Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 5 diberikan anggaran sebesar Rp.22.092.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.738.276, kegiatan untuk merealisasikan IKU 5 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai teknis diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Tabel 6 Capaian Target dan Realisasi IKU5 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III 2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2024-2029	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	0	0	0	0	0	1	30	1	100

Data Dukung IKU 5

Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam

Triwulan II (Semester I) Tahun 2025

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Manajemen Mutu Nomor : B.827/BPPMHKP.2/TU.210/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu Triwulan II (Semester I) Tahun 2025. Untuk UPT yang telah dilakukan penilaian pada Triwulan II Tahun 2025, menggunakan hasil penilaian masing-masing UPT. Sedangkan UPT yang belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu.

Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Triwulan I adalah sebesar 93,33 (124,29%); untuk nilai capaian Triwulan II adalah sebesar 89,93 (119,91%); dan capaian Semester I tahun 2025 adalah nilai rata-rata Triwulan I dan Triwulan II adalah sebesar 91,58 (122,11%). Detail nilai per UPT sebagaimana lampiran III.

Kesimpulan: Untuk UPT SKIPM Batam belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata capaian Pusat Manajeman Mutu, dari data tersebut menunjukan bahwa Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam Triwulan II adalah sebesar 89,93 (119,91%); dan capaian Semester I tahun 2025 adalah nilai rata-rata Triwulan I dan Triwulan II adalah sebesar 91,58 (122,11%).

Sasaran Kinerja 3.1 Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP Batam

IKU 6. Pelaksanaan Nilai IKPA lingkup Stasiun KIPM Batam

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, eisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak,halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan,renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 6 diberikan anggaran sebesar Rp. 6.410.317.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.925.406.983, kegiatan untuk merealisasikan IKU 6 sudah cukup baik hanya terkendala anggaran karena adanya efisiensi anggaran sesuai INPRES No.01 Tahun 2025 dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Realisasi target dilakukan pada akhir tahun saat penilaian.Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU nilai IKPA memiliki angka target 85 pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Target dan Realisasi IKU 6 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III 2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2024-2029	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Nilai IKPA lingkup Stasiun KIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak ada realisasi untuk Triwulan IIIkarena target dbuat di TW IV	Tidak ada realisasi untuk Triwulan IIIkarena target dbuat di TW II	85	100

Data Dukung IKU 6

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | SEPTEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	89.91	97.33	0.00	0.00	100.00	100.00	77.95	80%	0.00	97.44
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	19.47	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.96		98.67				100.00				

IKU 7. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Stasiun KIPM Batam

Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 7 diberikan anggaran sebesar Rp. 8.226.812.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.990.761.959, kegiatan untuk merealisasikan IKU 7 sudah cukup baik hanya terkendala anggaran karena adanya efisiensi anggaran sesuai INPRES No.01 Tahun 2025 dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Tabel 8 Capaian Target dan Realisasi IKU 7 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III 2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2020-2024	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Nilai kinerja pererncanaan anggaran lingkup Stasiun KIPMBatam	86	0	0	0	0	Tidak ada realisasi untukt Triwulan Ikarena target dbuat di TW IV	Tidak ada realisasi untukt Triwulan Ikarena target dbuat di TW II	71	100

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | SEPTEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	89.91	97.33	0.00	0.00	100.00	100.00	77.95	80%	0.00	97.44
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	19.47	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.96		98.67				100.00				

Data dukung IKU 7

IKU8 . Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup SKIPM Batam

Dalam suatu instansi perlu adanya pemeriksaan secara menyeluruh guna untuk mengevaluasi kinerja Satker SKIPM Batam, untuk itu BPK(Badan Pemeriksa Keuangan)merupakan suatu instansi yang diberi tangung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja Satker BKIPM Batam dan BPK akan mengeluarkan nilai temuan LHP,

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Ket.:"Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya"

untuk mengetahui jumlah realisasi/ persen capaian IKU ini dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 9 Capaian Target dan Realisasi IKU 8 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan III 2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2024-2029	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Batas tertinggi nilai tem uan hasil BPK atas LK(%)	0	0	0	0	0	Target dan realisasi dilaksanakan d TW IV	Target dan realisasi dilaksanakan d TW IV	≤1	0

IKU9 . Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Batam

SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (*attitude*), keahlian (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM. Nilai IP ASN dicapai dengan ketentuan sebagai berikut : kualifikasi,kompetensi,kinerja dan disiplin

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN SKIPM Batam pada tahun 2025 adalah TINGGI.Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU indeks profesionalitas ASN memiliki angka target pada tahun 2025 adalah 83 .

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 9 diberikan anggaran sebesar Rp. 4.332.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.329.720, kegiatan untuk merealisasikan IKU 9 sudah terealisasi dengan baik hanya saja Sebagian anggaran terkendala karena adanya efisiensi anggaran sesuai INPRES No.01 Tahun 2025 dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Realisasi target dilakukan pada akhir tahun saat penilaian. Data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Target dan Realisasi IKU 9 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III			Realisasi TW III		Renstra 2020-2024	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**ersen**
Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak ada target untuk TW I karena dilaksanakan di TW II	Tidak ada target untuk TW I karena dilaksana kan di TW II	83	100

Data dukung IKU 9

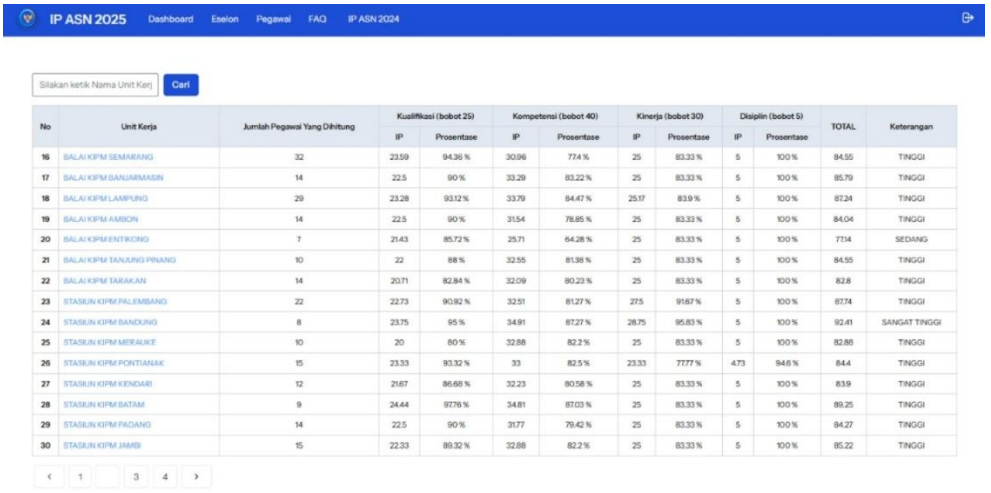

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerj Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	BALAI KIPM SEMARANG	32	23.59	94.36 %	30.96	77.4 %	25	83.33 %	5	100 %	84.55	TINGGI
17	BALAI KIPM BANJARMASIN	14	22.5	90 %	33.29	83.22 %	25	83.33 %	5	100 %	85.79	TINGGI
18	BALAI KIPM LAMPUNG	29	23.28	93.12 %	33.79	84.47 %	25.17	83.9 %	5	100 %	87.24	TINGGI
19	BALAI KIPM AMBON	14	22.5	90 %	31.54	78.85 %	25	83.33 %	5	100 %	84.04	TINGGI
20	BALAI KIPM ENTIKONG	7	21.43	85.72 %	25.71	64.28 %	25	83.33 %	5	100 %	77.14	SEDANG
21	BALAI KIPM TANJUNG PINANG	10	22	88 %	32.55	81.38 %	25	83.33 %	5	100 %	84.55	TINGGI
22	BALAI KIPM TARAKAN	14	20.71	82.84 %	32.09	80.23 %	25	83.33 %	5	100 %	82.8	TINGGI
23	STASIUN KIPM PALEMBANG	22	22.73	90.92 %	32.51	81.27 %	27.5	91.67 %	5	100 %	87.74	TINGGI
24	STASIUN KIPM BANDUNG	8	23.75	95 %	34.91	87.27 %	28.75	95.83 %	5	100 %	92.41	SANGAT TINGGI
25	STASIUN KIPM MERAUKE	10	20	80 %	32.88	82.2 %	25	83.33 %	5	100 %	82.88	TINGGI
26	STASIUN KIPM PONTIANAK	15	23.33	93.32 %	33	82.5 %	23.33	77.77 %	4.73	94.6 %	84.4	TINGGI
27	STASIUN KIPM KENDARI	12	21.67	86.68 %	32.23	80.58 %	25	83.33 %	5	100 %	83.9	TINGGI
28	STASIUN KIPM BATAM	9	24.44	97.76 %	34.81	87.03 %	25	83.33 %	5	100 %	89.25	TINGGI
29	STASIUN KIPM PADANG	14	22.5	90 %	31.77	79.42 %	25	83.33 %	5	100 %	84.27	TINGGI
30	STASIUN KIPM JAMBI	15	22.33	89.32 %	32.88	82.2 %	25	83.33 %	5	100 %	85.22	TINGGI

‹ 1 3 4 ›

IKU10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untukmendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakanpenyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No.249/2011.

NK = (P x Wp) +(K x Wk) (PK x Wpk) (E x We)

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker denganakumulasi pagu anggaran seluruh satker(Bobot

Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah

bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator

kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran

(WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volumekeluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot

Efisiensi (WE) =28,6%)

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 10 diberikan anggaran sebesar Rp. 8.226.812.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.990.761.959, kegiatan untuk merealisasikan IKU 10 sudah cukup baik hanya terkendala anggaran karena adanya efisiensi anggaran sesuai INPRES No.01 Tahun 2025 dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Realisasi target dilakukan pada akhir tahun saat penilaian. Data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Target dan Realisasi IKU10 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III 2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2020-2024	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam (Nilai)	0	0	86	0	0	Tidak ada realisasi di di TRIWULAN III karena tidak ada target di TRIWULAN III	Tidak ada realisasi di di TRIWULAN III karena tidak ada target di TRIWULAN I	86	100

IKU11 . Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerjaLingkup SKIPM Batam

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada SKIPM Batam berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IIITahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh SKIPM BATAM yang menjadi objek pengawasan. Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP**.** Setiap instansi setelah melaksanakan review kinerja maka akan dikeluarkan temuan yang didapatkan selama proses review dilaksanakan untuk itu perlu adanya rekomendasi hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaiki kinerja lingkup satker. Pada Triwulan IIITahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100%.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 11 diberikan anggaran sebesar Rp. 8.226.812.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.990.761.959, kegiatan untuk merealisasikan IKU 10 sudah cukup baik hanya terkendala pengelola kegiatan dan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen,dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja capaian IKU ini dapat dilihat di table dibawah ini :

Tabel 12 Capaian Target dan Realisasi IKU11 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2020-2024	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LingkupSKIPM Batam	82	80	86	0	0	82	98.53	75	100

Data Dukung IKU 11

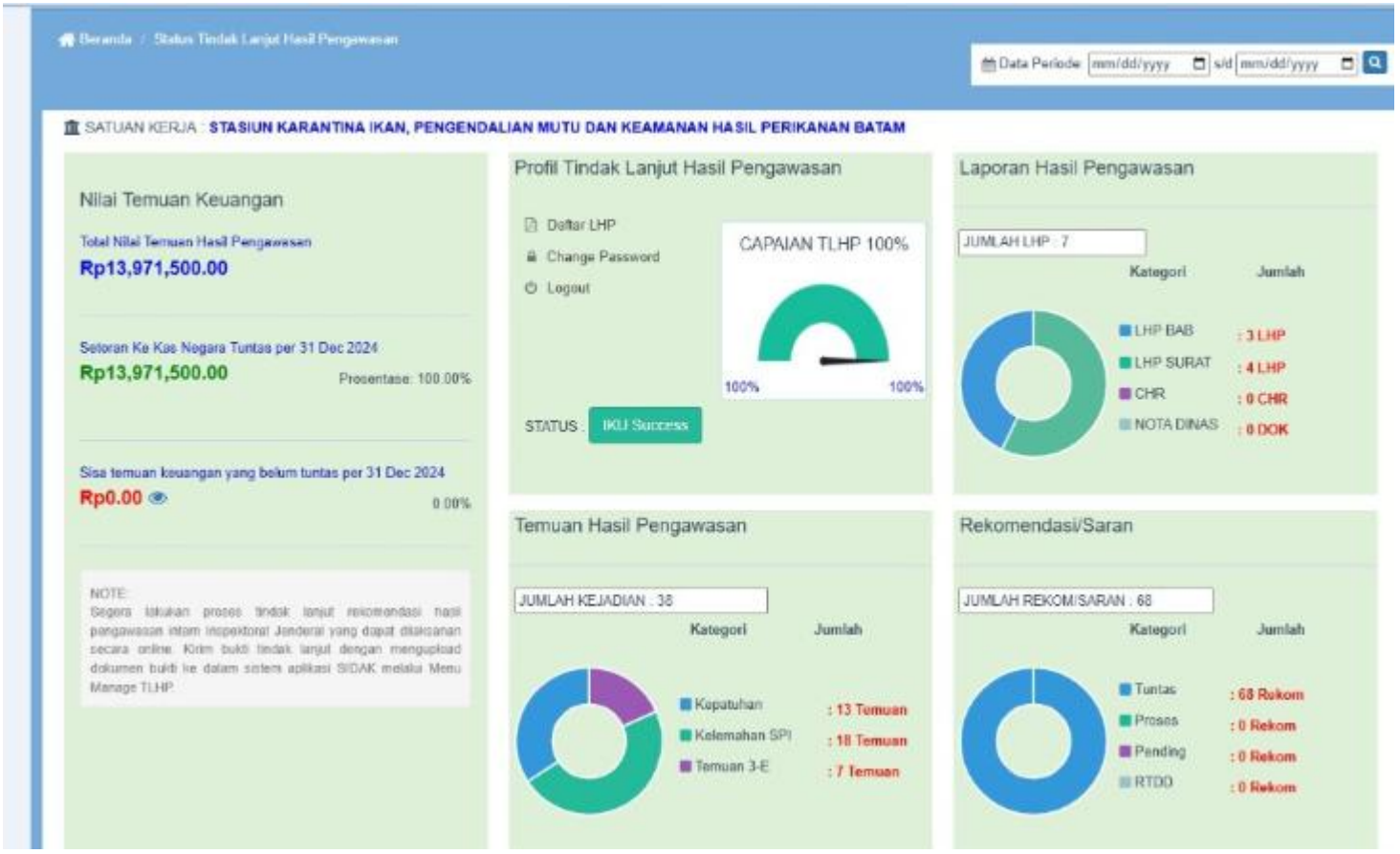

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Nomor : SK-PBG-217112-27062025-001

Membaca : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor	: SK-PBG-217112-27062025-001 Tanggal 27-06-2025
Nama pemohon/Pemilik	: M. DARWIN SYAH PUTRA
Bangunan gedung	: GEDUNG LABORATORIUM DAN POS JAGA
Alamat	: JALAN M. NAHAR BATAM CENTER Kel/Desa Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam Prov Kepulauan Riau
Untuk	: Bangunan Eksisting
Fungsi Bangunan Gedung	: Fungsi Sosial dan Budaya
Klasifikasi bangunan Gedung	: Bangunan Tidak Sederhana
Nama bangunan gedung	: GEDUNG LABORATORIUM DAN POS JAGA
Luas Bangunan Gedung	: 278,64 m^2
Hak atas tanah	: Sertifikat
Luas tanah	: 2000,00 m^2
Pemilik Tanah	: Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Kelautan dan Perikanan
Terletak di	: JALAN M. NAHAR BATAM CENTER Kel/Desa Belian, Kec.Batam Kota, Kota Batam, Prov Kepulauan Riau

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

IKU12. Persentase Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang Diumumkan Pada Sirup Lingkup SKIPM Batam

Untuk Tahun 2025 IKU untuk rencana umum pengadaan barang dan jasa ditambahkan sebagai indikator kinerja lingkup SKIPM Batam, hal ini dikarenakan untuk pengadaan barang dan jasa harus disesuaikan dengan target yang terdapat di RKAKL. Rencana Umum Pengadaan (RUP)

adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum.

Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 12 diberikan anggaran sebesar Rp. 8.226.812.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.990.761.959, kegiatan untuk merealisasikan IKU 10 sudah cukup baik,operator telah berhasil menginput data ke aplikasi SIRUP dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Perhitungan akan dilakukan di akhir tahun anggaran karena target kinerja ini bersifat triwulan. Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja capaian IKU ini dapat dilihat di table dibawah ini :

Tabel 13 Capaian Target dan Realisasi IKU12 pada Triwulan IIITahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan III 2025			Realisasi TRIWULAN III		Renstra 2024-2029	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Persentase Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada SIRUP	76	76	76	100	100	100	100	100	0

Data Dukung IKU 12

Lampiran 1
Nomor : 381/SJ.7/PL.410/X/2025
Tanggal : 8 Oktober 2025

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 3	% Capaian Target IKU TW 3	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
02	Inspektorat Jenderal	1	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,132,182,915,103	1,132,182,915,103	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	43,754,804,122	43,754,804,122	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	875,549,848,134	875,549,848,134	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	51,933,565,281	51,933,565,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	336,649,816,000	336,649,816,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	1,081,158,327,186	1,081,158,327,186	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	342,443,130,996	342,443,130,996	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
	TOTAL	**149**	**3,875,626,164,822**	**3,875,626,164,822**				**100.00%**	

IKU13. Nilai Pembangunan Integritas SKIPM Batam

Untuk Tahun 2025 IKU untuk nilai pembangunan integritas lingkup SKIPM Batam ditambahkan sebagai indikator kinerja lingkup SKIPM Batam, hal ini dikarenakan integritas pegawai , telah menjadi perhatian dan perlu dievaluasi ,oleh karena itu untuk realisasi di tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat realisasi dikarenakan IKU ini dilaksanakan di tahun 2025

Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap orang untuk mencegah terjadinya korupsi. Nilai-nilai pembangunan integritas merujuk pada serangkaian prinsip moral dan etika yang menjadi dasar dalam membangun karakter individu maupun organisasi yang anti korupsi dan berkualitas. Nilai-nilai ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, keberanian, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 12 diberikan anggaran sebesar Rp. 8.226.812.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.990.761.959, kegiatan untuk merealisasikan IKU 13 sudah cukup baik,seluruh pegawai SKIPM

Batam telah melaksanakan nilai-nlai integritas dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Tabel 14 Capaian Target dan Realisasi IKU13 pada Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan III 2025			Realiasi TW II		Renstra 2024-2029	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Nilai pembangunan integritas SKIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak ada realisasi IKU ini di TRIWULAN III karena target dibuat di 2025	Tidak ada realisas IKU ini di TRIWULAN III karena target dibuat di 2025	100	0

IKU14. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BKIPM adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikana oleh BKIPM dapat diterima oleh stakeholders kelautan perikanan, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indikator indeks efektiitas kebijakan pemerintah merupakan indikator di Level 0 yang diturunkan ke seluruh level I dengan metode lingkup dipersempit. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai nilai Indeks persepsi kualitas pelayanan BKIPM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN lingkup SKIPM BATAM antara lain melibatkan stakeholder dalam proses penyusunan kebijakan, sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder di daerah, menyusun policy brief atas pelayanan yang telah diambil dan mengevaluasi kualitas pelayanan tersebut untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut, survei peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas layanan di lapangan. Disamping itu, telah digunakannya fasilitas media sosial untuk menyerap aspirasi stakeholder. Sehingga dari hasil evaluasi, diharapkan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai fokus perbaikan kualitas pelayanan publik, diantaranya:

a. Melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses penyusunan Standar Pelayanan

b. Menindaklanjuti hasil SKM seluruhnya secara lebih cepat.

c. Menyediakan ruang khusus untuk layanan konsultasi dan pengaduan tatap muka.

d. Memperluas media dokumentasi hasil konsultasi dan penanganan pengaduan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

e. Meningkatkan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik menjadi bulanan

f. Mempertimbangkan alokasi anggaran untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik dan

g. Memonitoring pelaksanaan e-service agar berkelanjutan dan mengikutsertakan pada kompetisi inovasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam selaku salah satu unit instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik tentu tidak dapat terlepas tuntutan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan publik. Selain itu, salah satu persyaratan ISO 9001 : 2015, SNI ISO/IEC 17020 : 2012 dan SNI ISO/IEC 17025 : 2017 juga mempersyaratkan akan pentingnya umpan balik pelanggan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Survey Kepuasan Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Unsur Survey Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di unit pelaksana teknis (UPT) BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM) masyarakat/pengguna jasa dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/ Ap likasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdi ri atas 9 unsurpertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produ k Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai i ndeks diperol eh dari nilai total ratarata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Tahunan tahun 2025 Stasiun KIPM Batam bernilai 96.74 dengan kategori **sangat baik**. Nilai survey ini diperoleh dari 29 responden pelaku usaha perikanan pengguna layanan Stasiun KIPM Batam dari 9 unsur pertanyaan dengan nilai rata-rata per unsur sebagai berikut : persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan, sistem,mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan, biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan, produk spesifikasi jenis pelayanan,kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta fasilitas pelayanan.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 14 diberikan anggaran sebesar Rp8.226.812.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.990.761.959,, kegiatan untuk merealisasikan IKU 14 sudah baik, dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Tabel 15 Capaian Target dan Realisasi IKU 14 pada Tahunan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Tahunan 2025			Realisasi Tahunan		Renstra 2024-2029	
			Target	**Realisasi**	**%**	**2023**	**2024**	**Target**	**Persen**
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publikdi UPT SKIPM Batam	0	0	88	96,74	100%	91.88	0	3.62	0

Data Dukung IKU 14

5

16	Stasiun KIPM Luwuk Banggal	97,79	97,06	96,32	97,79	96,32	96,32	97,06	97,79	97,06	97,06	A	Sangat Baik	34
17	Balai KIPM Medan I	97,56	97,56	97,56	98,17	96,95	97,56	97,56	98,17	92,07	97,02	A	Sangat Baik	41
18	Balai Besar KIPM Makassar	97,12	96,86	96,78	96,63	96,93	96,82	96,78	96,97	96,82	96,86	A	Sangat Baik	660
19	Stasiun KIPM Batam	97,41	97,41	98,28	97,41	97,41	95,69	94,83	97,41	94,83	96,74	A	Sangat Baik	29
20	Stasiun KIPM Padang	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	94,44	94,44	100,00	94,44	96,60	A	Sangat Baik	9
21	Stasiun KIPM Kendari	99,29	96,43	96,43	95,71	96,43	95,00	96,43	95,71	96,43	96,43	A	Sangat Baik	35
22	Balai KIPM Ambon	95,83	97,50	95,83	96,25	96,25	95,83	95,83	96,67	95,83	96,20	A	Sangat Baik	60
23	Balai KIPM Mataram	96,88	96,31	96,02	95,17	96,02	95,45	95,45	96,02	96,88	96,02	A	Sangat Baik	88
24	Stasiun KIPM Bima	97,02	96,43	95,24	95,24	95,83	95,83	97,62	95,83	94,05	95,90	A	Sangat Baik	42
25	Stasiun KIPM Medan II	95,74	96,28	93,62	97,34	95,21	95,74	96,28	96,81	95,74	95,86	A	Sangat Baik	47
26	Balai KIPM Surabaya II	97,73	97,93	96,49	97,73	97,31	97,31	97,73	97,73	79,34	95,48	A	Sangat Baik	121
27	Stasiun KIPM	95,24	94,64	95,24	96,43	95,24	95,24	94,64	95,83	94,64	95,24	A	Sangat Baik	42

REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Batam pada Triwulan IIIanggaran (T.A) 2025 adalah **Rp.8.226.812.000-**,realisasi **Rp. 3.049.850.116** dengan jumlah blokir **Rp.1.632.243.000 karena adanya kebijakan INPRES 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran** .Pada Triwulan III Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Batam sebesar **Rp. 3.049.850.116** atau sebesar **32.13 %** dari keseluruhan pagu anggaran. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM Batam T.A 2025 Triwulan III berdasarkan jenis kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan III TA. 2025

No.	Kode/Kegiatan	Pagu	Realisasi TRIWULAN III	%
1	3987/Dukungan Manajemen	7,776,812,000	3,925,406,983	50.48%
3	3989/Pengendalian Mutu	270,000,000	12,540,000	4.64%
4	7010/Manajemen Mutu	180,000,000	52,814,976	29.34%
	TOTAL	**8,226,812,000**	**3,990,761,959**	48.51%

Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III TA. 2025

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TRIWULAN III	%
1	**Belanja Pegawai**	3,906,920,000,-	2,237,557,874,-	57.27
2	**Belanja Barang**	4,319,892,000,-	1,753,204,085,-	48.91
3	**Belanja Modal**	0,-	0,-	0
	TOTAL	8.226.812.000**,-**	3,990,761,959**,-**	**32.62**

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan III tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran *(Financial Plan)*, dan Rencana Strategis *(Strategic Plan)* pada masa-masa mendatang.

REKOMENDASI

Evaluasi rencana aksi capaian kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara mengevaluasi dari rencana aksi yang telah disusun, membandingkan antara target (rencana) dan realisasi setiap IKU pada masing-masing perspektif. Evaluasi rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi maka dapat diketahui beberapa hal pada pencapaian IKU antara lain: Secara umum pencapaian kinerja Stasiun KIPM Batam sudah baik dengan diperolehnya nilai NPSS sebesar 114.77 % padaaplikasi kinerjaku dan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan pada tahun berikutnya:

1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pendukung IKU pada tahun 2025 sehingga dapat meningkatkan percepatan target kinerja di Triwulan IIII 2025
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2025 sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pengukurannya bersifat triwulanan, agar dapat direalisasikan triwulan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan III Tahun 2025, secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Batam pada Triwulan III telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah terus meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian indikator kinerja Stasiun KIPM Batam, sehingga dapat tercapai yang maksimal.

BPP
MHKP
Bring Safety through Quality

LAMPIRAN-LAMPIRAN